



UNIVERSITAS ANDALAS

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENYAKIT DIABETES MELITUS (DM)
DI WILAYAH PUSKESMAS TIKU KABUPATEN AGAM
TAHUN 2022**

Oleh :

ANI AGUSWITA

No.Bp. 1811211029

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2022

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juni 2022

ANI AGUSWITA, No. BP. 1811211029

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENYAKIT DIABETES MELITUS (DM) DI WILAYAH PUSKESMAS TIKU
KABUPATEN AGAM TAHUN 2022**

XI+ 140 halaman, 22 tabel, 2 gambar, 12 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Puskesmas Tiku Tahun 2019 dan 2020 menjadi puskesmas dengan capaian SPM DM terendah yaitu 80,67% dan 26,04% jauh dari target keberhasilan 100%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPM DM di wilayah Puskesmas Tiku tahun 2022.

Metode

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Dipilih 15 informan di dinkes dan Puskesmas Tiku berdasarkan *purposive sampling*. Indikator yang diteliti merupakan faktor implementasi kebijakan Edward.III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil

Kebijakan SPM DM belum dikomunikasikan secara jelas kepada implementor dan sasaran. Sumber daya implementasi kebijakan belum memadai terutama sarana prasaranan dan dana. Disposisi berupa komitmen telah dimiliki oleh implementor tapi belum didukung dengan pemberian insentif. Struktur birokrasi pada fragmentasi telah dilakukan secara berjenjang namun SOP yang telah dibuat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat pelaksanaan kegiatan SPM DM yang belum terlaksana dengan baik terutama kegiatan skrining dan edukasi pasien DM.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan SPM DM di Puskesmas Tiku belum optimal, terutama pada komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menyampaikan kembali informasi mengenai kebijakan SPM DM dan dilanjutkan oleh Puskesmas Tiku kepada masyarakat. Skrining kesehatan dan edukasi pasien DM pada kegiatan SPM DM perlu dimaksimalkan.

Daftar Pustaka : 76 (2004 – 2021)

Kata Kunci : Implementasi, SPM DM, Edward III

FACULTY OF PUBLIC HEALTH ANDALAS UNIVERSITY

Undergraduate Thesis, June 2021

“ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE MINIMUM SERVICE STANDARD POLICY FOR DIABETES MELITUS (DM) IN TIKU PRIMARY HEALTH CARE OF AGAM REGENCY IN 2022”

XI+ 140 pages, 22 tables, 2 pictures, 12 attachments

ABSTRACT

Objective

Tiku primary health care in 2019 and 2020 was became the lowest achievement of diabetes melitus minimum service standard namely 80,67% and 26,04 % far away from the success goals is 100%. This research aims to determine the implementation of SPM DM in the Tiku primary health care in 2022.

Method

This was qualitative research using case study. The data was collected by in-depth interviews, observation, and documents review. Have selected 15 informans from public health office and Tiku primary health care based on purposive sampling. The indicators studied are factors of Edward.III policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Result

Diabetes melitus minimum service standard policies have not been clearly communicated to implementers and targets. Policy implementation of resources is not sufficient, especially infrastructure and funds. Disposition is a commitment that has been owned by the implementer but has not been supported by the provision of incentives. The structure of the fragmentation has been carried out in stages but the SOP made are not utilized optimally. There is an implementation of diabetes melitus minimum service standard policies activities that have not been carried out properly, especially screening and education activities for DM patients.

Conclusion

The implementation of the DM SPM policy at the Tiku primary health care has not been optimal, especially in communication, resources, and bureaucratic structures. The public health office is expected to be able to re-submit information about the SPM DM policy and be continued by the Tiku primary health care to the community. Health screening and education of DM patients on SPM DM activities need to be maximized.

References : 76 (2004 – 2021)

Keywords : Implementation, SPM DM, Edward III